

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada penulisan judul skripsi ini, peneliti sedikit menjelaskan sub-bab dari judul skripsi, agar menghindari kesalahan dalam memahami maksud yang ada pada judul ini. Adapun judul pada skripsi ini yakni **“Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan Di Lampung Barat (Studi Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan)”**.

Upaya menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.¹

Pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.²

Menangani memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menangani dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman.³

¹Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka 2007) h. 1032

² <https://definisi-pemerintah/>: diakses pada 25 september 2019 pukul 12.00 WIB

³Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta : Balai Pustaka. 2007) h.1029

Hutan berdasarkan UU NO. 41 Tahun 1999 Bab I Pasal I ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.⁴

Lahan ialah tanah terbuka, tanah garapan, maupun tanah yang belum diolah yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio-ekonominya bagi masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia.⁵

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka untuk menghindari kesalahpahaman yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah upaya pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Lampung Barat yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya pemerintah dalam menangani kebakaran hutan.

B. Alasan memilih judul

Adapun alasan peneliti dalam memilih judul ini yaitu :

1. Alasan Objektif
 - a. Adanya keprihatinan yang dirasakan dan dilihat oleh peneliti tentang keadaan hutan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
 - b. Penelitian tentang peran pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Lampung Barat.

⁴Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁵ Direktorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum. *Kamus Tata Ruang* (Jakarta: cipta karya) h. 226

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang peneliti tekuni yaitu Pemikiran Politik Islam, dalam jurusan ini terdapat bidang Sistem pemerintahan yang membahas tentang sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) baik berdasarkan tinjauan islam atau pun secara umum. Selain itu, literatur yang cukup memadai peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
- b. Lokasi penelitian juga terjangkau oleh peneliti.

C. Latar Belakang Masalah

Peraturan pemerintah no. 4 tahun 2001 pada bagian Bab I Pasal 1 hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁶

Hutan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri oleh manusia.⁷ Hutan adalah sumber daya alam sehingga masyarakat harus menjaga dan melestarikannya Allah Swt berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001

⁷Ahmad Redi, *Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 1-3

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S AL-A'raf : 56)

Tafsir Ibnu Katsir: Allah Swt. melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki, karena sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadilah perusakan padanya, maka hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah. Maka Allah Swt. melarang hal tersebut, dan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah-Nya dan berdoa kepada-Nya serta berendah diri dan memohon belas kasihan-Nya. Untuk itulah Allah Swt. berfirman; Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya dan penuh harap kepada pahala berlimpah yang ada di sisi-Nya. Kemudian dalam firman selanjutnya disebutkan bahwa, sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu mereka yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya: hingga akhir ayat. Dalam ayat ini juga disebutkan *qaribun* dan tidak disebutkan *qaribatun* mengingat di dalamnya (yakni lafaz rahmat) terkandung pengertian pahala atau karena disandarkan kepada Allah, karena itu disebutkan *qaribun minal muhsinin* amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Matar Al-Warraq pernah mengatakan, “Laksanakanlah janji Allah dengan taat kepada-Nya, karena sesungguhnya Dia telah menetapkan bahwa rahmat-Nya amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁸

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan suatu kawasan hutan yang ditunjuk oleh UNESCO untuk melindungi hutan hujan tropis yang ada di pulau Sumatera. TNBBS berada di tiga Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.

⁸ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-56.html> diakses pada tanggal 13 juli pukul 18.30 WIB

TNBBS memiliki visi dan misi yaitu pengamanan hutan yang tertuang dalam penyusunan rencana strategis BBTNBBS tahun 2015-2019.

Visi Balai Besar TNBBS adalah : ***“Mewujudkan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dan Keanekaragaman Hayati”***. Untuk mewujudkan visi tersebut maka diumumkan melalui misi pencapaian dan sasaran strategis dan kurun waktu 2015-2019 antara lain :

1. Memperkuat legitimasi kawasan TNBBS ditandai oleh batas kawasan yang tetap dan disetujui oleh para pihak dengan sasaran strategis kemantapan kawasan pengelolaan.
2. Meningkatkan kapasitas perlindungan dan meningkatkan kompetensi pengelolaan kawasan konservasi hayati dengan sasaran strategis yang sesuai dengan dengan tujuan pengelolaan ekosistem, menentukan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
3. Perbaiki tata kelola yang didukung oleh peraturan revisi, tinjauan zonasi, penilaian jalan alternatif dan navigasi, penilaian peraturan yang tidak sesuai dengan pembangunan lingkungan, dengan sasaran strategi mengatasi konflik pengaturan dan pengendalian.
4. Menerapkan pengelolaan kolaboratif dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja dengan sasaran strategis menanamkan kesadaran dan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNBBS secara adil dan bertanggung jawab.⁹

TNBBS melakukan analisis SWOT dengan memperhatikan analisis lingkungan strategis tentang strategis pengamanan hutan tahun 2015 adalah dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengatasi tantangan. Strategi yang disusun dibagi menjadi 2 yaitu kegiatan pokok pengamanan hutan dan kegiatan pendukung pengamanan hutan.

Kegiatan Pokok Pengamanan Hutan terdiri dari :

1. Peningkatan pengamanan preventif dan refresif
2. Penguatan kapasitas kelembagaan pengamanan hutan.

Kegiatan Pendukung Pengamanan Hutan terdiri dari :

1. Percepatan penetapan status kawasan TNBBS dan penyelesaian konflik batas beberapa lokasi TNBBS;
2. Menggali dan mengembangkan potensi wisata alam dan jasa lingkungan TNBBS ;
3. Penyadartahuan masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat sekitar TNBBS; dan
5. Tidak ada pembangunan atau menambah jalan baru yang memotong kawasan TNBBS.

⁹<https://programs.wcs.org/btnbbs/BeritaTerbaru/articleType/ArticleView/articleId/8374/A/KSI-BALAI-BESAR-TNBBS-DALAM-PEMGAMANAN-HUTAN.aspx>, diakses pada 10 juni 2020. pukul 21.35 WIB

6. Pembatasan volume kendaraan dan waktu perlintasan jalan tembus TNBBS.¹⁰

Kebakaran hutan telah menjadi masalah bukan hanya di Indonesia tetapi juga berdampak regional di Asia Tenggara yang berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan seperti gangguan sosio-ekonomi, dampak politik dan gangguan kesehatan.

Kebakaran hutan yang meluas sudah menjadi kejadian rutin di Sumatera dan di Kalimantan sejak awal 1900 dan peristiwa yang serius pertama kali terjadi di tahun 1997, ketika petani mengadopsi teknik “tebang dan bakar” untuk membuka lahan 1802 kilometer persegi sampai 2840 kilometer persegi untuk digunakan sebagai lahan pertanian.¹¹ Pemerintah menjadikan kebakaran hutan saat ini menjadi permasalahan yang harus ditangani dengan serius, pemerintah dalam melakukan salah satu upaya maka pemerintah membentuk suatu kumpulan atau organisasi yang menangani langsung dalam bidang kebakaran hutan yaitu membentuk Satuan Tugas (Satgas) kebakaran hutan dan lahan. Hal ini akan serupa dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan upaya agar menjaga keutuhan kawasan hutan yang ada di wilayah Indonesia.

¹⁰ <http://tnbbs.org/> diakses pada 10 juni 2020, pukul 21.00 WIB

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/6510/1/15.%20BAB%20I.pdf> diakses pada 24 februari 2020, pukul 09.00 WIB

Untuk sementara luas kebakaran hutan yang ada di Lampung dari tahun 2015-2019:¹²

Tabel 1
Luas Kebakaran Hutan di Provinsi Lampung sejak tahun 2014-2019

No.	Tahun	Jumlah luas (Ha)
1.	2014	80
2.	2015	71.326,49
3.	2016	3.201,24
4.	2017	6.177,79
5.	2018	15.156,22
6.	2019	2.913,00

Sumber : Sipongi. Karhutla Monitoring System, Direktorat PKHL KLHK RI (26 november 2019)

Tabel 2
Luas Kebakaran Hutan di Resort Suoh

No.	Tahun	Luas (Ha)	Lokasi
1.	2015	5	Gunung Lanang Pekon Ringgin Sari Kecamatan Suoh
2.	2016	-	-
3.	2017	1,5	Danau minyak dan danau asam
4.	2018	-	-
5.	2019	100 – 130	1. kebakaran terjadi pada danau belibis 2. Berbatasan dengan danau minyak, danau asam, dan danau lebar

Sumber : Arsip Resort Suoh tahun 2019

¹²Sipongi, *Karhutla Monitoring System*, Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Jumlah luas kebakaran hutan yang ada di Lampung dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun adanya naik turun jumlah kebakaran hutan yang terjadi di Lampung sama halnya dengan kebakaran hutan yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan adanya kenaikan luas yang terbakar. Pada tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Lampung Barat dengan waktu yang berdekatan. Kebakaran terjadi di Kecamatan Suoh, Padang Ilalang yang merupakan kawasan hutan TNBBS yang termasuk dalam wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang menghabiskan sekitar 100 Ha.

Kebakaran tersebut berada di daerah Danau Minyak, Danau Lebar dan Keramikan Suoh. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yaitu Bapak Aditia Warman beliau menyampaikan bahwa telah terjadinya kebakaran pada Padang Ilalang dalam hal ini yang diakibatkan oleh faktor alam dan faktor manusia, namun saat ini yang menjadi faktor utama kebakaran hutan adalah kecerobohan manusia yaitu membuang puntung rokok sembarangan ketika sedang berkunjung ke wisata Suoh.¹³ Kebakaran ini terjadi 2 kali secara berturut-turut dengan bulan yang berbeda yaitu Bulan Februari dan Bulan September tahun 2019.

¹³ Bapak Aditia Warman, *Pengendali Ekosistem Hutan*, Wawancara tatap muka, 23 januari 2020

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 bagian kelima tentang perlindungan hutan dan konservasi alam pasal 50 ayat 3 poin (d) yaitu : “membakar hutan”.¹⁴

Pasal 78 bab XIV tentang ketentuan pidana ayat 3 yakni : “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Jika pada pasal-pasal tersebut terjadi sebuah pelanggaran, maka untuk ketentuan sanksi dan tindak pidana sudah diatur dalam undang-undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan seperti yang tertuang pada pasal 78 bab XIV tentang ketentuan pidana.¹⁵

Pemerintah daerah atau pemerintah yang berwenang dalam menjaga dan melindungi hutan saat ini harus mempertegas tugas dan fungsinya, pemerintah terutama instansi terkait yaitu Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa kini harus mempertegas tugasnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah yaitu BBTNBBS Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Lampung Barat. Untuk itu peneliti mengangkat judul “*Upaya Pemerintah dalam Menangani Kebakaran Hutan dan lahan di Lampung Barat (Studi Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan)*”.

¹⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, (Bandung: Fokus Media, 2013) hal. 124

¹⁵ Ibid, hal. 136

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka ada beberapa hal yang menjadi fokus bahasan peneliti :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Lampung Barat ?
2. Bagaimana signifikansi pemerintah terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan di Lampung Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
2. Untuk mengetahui signifikansi upaya pemerintah terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan bisa menjadi bahan referensi penelitian yang akan dilakukan mengenai upaya pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Lampung khususnya di Lampung Barat.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat dan pembaca berguna untuk menambah informasi terutama dalam pengembangan ilmu politik terutama dalam manajemen dan pengelolaan hutan di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Lampung Barat, serta dapat mengevaluasi tugas, pokok dan fungsi dari pemerintah atau instansi tentang perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan konservasi di Lampung Barat khususnya.
- b. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku atau tulisan lain, maka peneliti akan memaparkan karya ilmiah atau skripsi yang serupa tentang upaya pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta ada beberapa karya ilmiah yang memiliki tema tentang kebijakan pemerintahan.

Adapun salah satu karya ilmiah yang di muat dalam Jurnal Ilmu Hukum dari Armen Yasir salah satu dosen hukum Tata Negara Universitas Lampung beliau mengangkat judul **“Pengelolaan Sumber Daya Hutan di**

Lampung Barat". Fokus kajian dari karya ilmiah tersebut berada pada sistem pengelolaan, dan sumber daya alam. Sedangkan, pada karya ilmiah yang di tulis oleh peneliti fokus terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Baik dari segi langkah-langkah dalam pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan.

Jurnal selanjutnya oleh Kunto Arief Wibowo dengan judul skripsi **"Managemen Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Guna Peningkatan Ekonomi Rakyat"**. Dengan Fokus kajian tentang Ekonomi, Kebakaran Hutan dan Lahan serta cara memanajemen kebakaran hutan dan lahan di komando resort Militer 032 Wirabraja. Perbedaan antara jurnal ini dengan karya ilmiah yang peneliti tulis adalah berada pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, seperti di penjelasan sebelumnya bahwa karya ilmiah ini terfokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Lampung Barat.

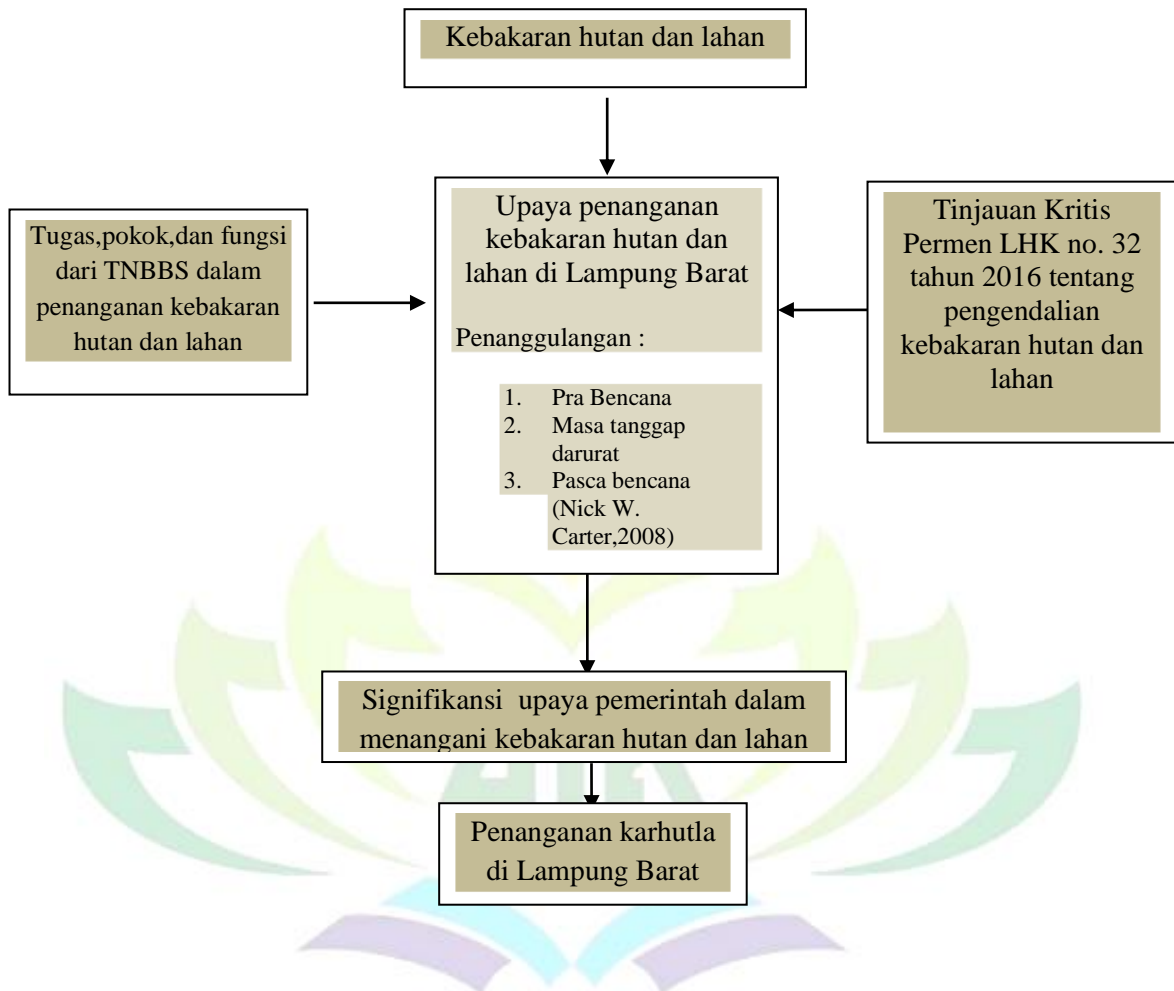
Jurnal selanjutnya yaitu oleh Irwandi dan kawan-kawan mereka ialah dosen Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus Samarinda dengan judul **"Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur"**. Pada jurnal ini Irwandi Dkk memfokuskan penelitian nya pada identifikasi faktor yang menjadi penyebab utama kebakaran lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Sedangkan pada karya ilmiah peneliti yang menjadi perbedaan nya ialah pada karya ini

meneliti tentang signifikansi pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Lampung Barat.

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas nama mahasiswa Mutia Herlita Putri mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, dengan judul skripsi **“Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata di Taman Nasional Way Kambas Lampung”**. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang pengembangan pariwisata dan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Taman Nasional Way Kambas dan pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur. Yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah dibagian *locus* atau lokasi dimana penelitian yang akan lakukan oleh peneliti ada pada Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) bagian Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa (BPTN WIL. II LIWA).

H. Kerangka Pikir

Tabel 3
Kerangka pikir



Kerangka pikir utama yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *Disaster Management Cycle* (Nick W. Carter), teori ini sebagai penanggulangan bencana terdapat tiga situasi penting yang harus diperhatikan dan dipelajari yaitu situasi pra bencana, masa tanggap darurat dan pasca bencana. Pra bencana adalah kondisi sebelum terjadinya bencana atau persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebagai antisipasi.

Tanggap darurat bencana yaitu suatu kondisi saat bencana terjadi atau langkah-langkah konkrit saat bencana terjadi. Pasca bencana adalah hal yang harus dilakukan setelah terjadinya bencana. Menurut Carter, dalam manajemen bencana ada sebuah koordinasi sebagai teori pendukung untuk mencapai sebuah hasil yang baik, koordinasi sebagai sebuah proses.¹⁶ Taraf analisis penelitian ini menelaah tentang manajemen bencana serta koordinasi dalam penanganan karhutla di tingkat daerah. Khususnya koordinasi antar lembaga pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang terlibat dalam penanganan Karhutla di Lampung Barat.¹⁷ Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori ini agar mampu menjelaskan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh TNBBS dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

I. Metode Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

Menurut Mardais, metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁸ Sedangkan Menurut Kartini Kartono, metode penelitian dapat diartikan sebagai : cara-cara berpikir dan berbuat yang disiapkan

¹⁶Kunto Arief Wibowo, Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 3 No. 1 (2019)

¹⁷Kushartati Budiningsih, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.14. no. 2 (2017)

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004). cet. ke 7 h. 24

dengan baik-baik untuk mengadakan sebuah penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁹

Menggunakan metode penelitian, peneliti mampu untuk menemukan dan menganalisis sebuah masalah tertentu. Sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran yang sebenarnya, karena metode penelitian memberikan pedoman tentang cara untuk bagaimana seorang ilmuwan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa yang dihadapi. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data dan menguji kebenaran ilmiahnya. Agar dapat menulis skripsi ini serta memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah, maka peneliti menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Reserach*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.²⁰ Penelitian ini dilakukan terhadap Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa BBTNBBS dan Resort Suoh.

2. Sifat Penelitian

Adapun dilihat dari sifatnya deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan serta sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, ciri-ciri serta

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung, Mandar Maju, 1996) Cet. Ke VII, h. 20

²⁰Ibid, h. 32

hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu. deskriptif kualitatif yaitu penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.²¹ Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa BBTNBBBS dalam menangani kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana cara mengelola dan menjaga hutan, yang dikemudian hari akan mendapatkan gambaran umum yang secara komprehensif tentang hal itu.

Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hanya memaparkan dan melaporkan suatu keadaan yang tanpa menarik kesimpulan dari pola pemikiran objek tersebut dan kemudian pada akhirnya, pembahasan dilakukan suatu analisa secara kritis terhadap pemikiran tersebut.

b. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada aspek kualitas data dan proses kegiatan objek yang akan diteliti, maka memerlukan sumber data yang benar-benar menjelaskan masalah pada penelitian. Data tersebut ialah :

1. Data Primer

²¹ Eusami Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, PT. Bumi Aksara. 2000) Hal. 4

Menurut Sugiyono, data primer adalah penuturan atau catatan para saksi mata. Data tersebut diperoleh pengamat atau partisipan yang benar-benar menyaksikan suatu peristiwa.²² Dalam penelitian ini untuk menentukan *key informan* menurut Spradley dalam (Moleong), informan memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu :

- a. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau lokasi aktivitas yang menjadi target atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- b. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka masih relatif, masih jujur dalam memberikan informasi.²³ Berdasarkan kriteria diatas, yang menjadi sumber atau informan data primer dapat kita lihat pada tabel 4.

²²Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 308

²³Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2004). Hal 165

Tabel 4
Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan	Tempat/ Tanggal Interview
1.	Ismanto, S.Hut., MP	Kepala Teknis Balai Besar TNBBS	Kota Agung/ 12 Juni 2020
2.	Amri, S.Hut., M.Hum	Kepala BPTN Wil II Liwa	Way Mengaku/ 09 Juni 2020
3.	Maris Periyadi, S.H., M.Hum	Kepala Seksi BPTN Wil III Krui BPTN Wil II Liwa	Sekuting/ 23 Juni 2020
4.	Sulki, S.H	Kepala Resort Suoh	Sekuting/24 Juni 2020
5.	Aditia Warman	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)	Way Mengaku/ 09 Juni 2020
6.	Wallam	Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA)	Suoh/ 25 Juni 2020
7.	Joko Sutrisno	Anggota BNPB Lampung Barat	Suoh/ 25 Juni 2020
8.	Cucun Sunarya	Ketua Forum Jasa Wisata	Suoh/ 25 Juni 2020
9.	Ahim Abiani	Peratin Pekon Suka Marga	Suka Marga / 25 Juni 2020
10.	Dwi Luyo	Masyarakat Mitra Polhut	Suoh / 25 Juni 2020
11.	Doni Lapirawan	Anggota Polisi Kehutanan	Suoh / 25 Juni 2020
12.	Supriatna	Pengendali Ekosistem Hutan TNBBS	24 Juli 2020

No.	Nama	Jabatan	Tempat/ Tanggal Interview
13.	Muslimin	Tokoh Masyarakat Umum	25 Juli 2020

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang sudah jadi atau baik dalam bentuk laporan ataupun dalam bentuk karya tulis (buku) yang disajikan untuk umum oleh instansi atau lembaga terkait tetapi tidak diberikan secara langsung pada yang mencari data atau disebut juga dengan data yang sudah tersedia.²⁴ Data-data yang diperoleh oleh peneliti saat melakukan pra penelitian, saat observasi, dan pada saat wawancara pada informan penelitian dapat dilihat pada tabel 1.5 yang dibedakan berdasarkan jenis data dan sifat data penelitian sehingga kedua data tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam karya tulis ilmiah. Berikut adalah tampilan tabel 5

Tabel 5
Data sekunder

No.	Jenis Data	Sifat data
1.	Laporan Kronologis Kebakaran Kawasan TNBBS	Arsip TNBBS

²⁴Ibid,.Hal 309

No.	Jenis Data	Sifat data
2.	Sejarah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	Arsip TNBBS
3.	Data Potensi TNBBS	Arsip TNBBS
4.	Data Kegiatan TNBBS (Dokumentasi Pemadaman Api, Dokumentasi Potensi Wisata Alam, Buku Informasi TNBBS)	Arsip TNBBS
5.	Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Soft File
6.	Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah	Soft file
7.	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	Soft file
8.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.	Soft file
9.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2016 Organisasi Dan Tata Kerja TN	Soft File

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah :

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang akan di teliti.²⁵ Ketika mulai melakukan penelitian hal yang pertama dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pra penelitian atau turun lapangan sebelum penelitian dimulai guna untuk mendapatkan data awal dalam proses proposal penelitian, setelah menyelesaikan proses proposal penelitian maka peneliti memberikan surat pengantar kepada instansi yang dituju yaitu Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk mendapatkan izin untuk memasuki kawasan konservasi atau yang sering disebut dengan SIMAKSI, dalam proses pengambilan simaksi maka peneliti harus memaparkan proposal penelitian kepada pihak TNBBS untuk menyampaikan maksud dari karya ilmiah yang akan dijalani selama proses penelitian, setelah mendapatkan simaksi maka peneliti memulai penelitian yang diawali dengan kunjungan kepada Bidang Pengelolaan TN wilayah II Liwa BBTNBBS, kemudian peneliti berdialog dengan kepala BPTN Wil.II Liwa dan pengendali ekosistem hutan. Setelah melakukan tanya jawab dengan Kepala BPTN Wil. II Liwa peneliti melanjutkan audiensi dengan

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 145

Pelaksana Teknis (Plt.) Balai Besar TNBBS untuk memperoleh data yang cukup valid sehingga data yang diperoleh dari berbagai tokoh TNBBS baik dari Plt sampai pada Kepala Resort dapat terkumpulkan dan dijadikan dalam yang valid terhadap karya ilmiah ini, selain itu, peneliti juga melakukan tanya jawab terhadap mitra-mitra TNBBS yang berkaitan dengan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ada dikawasan TNBBS, mitra-mitra tersebut dapat kembali kita lihat pada tabel 1.4.

2. Metode interview

Interview menurut Mardalis adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penulis atau peneliti.²⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode interview bebas terpimpin, artinya pembebasan kepada orang lain yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawabannya sendiri yang sesuai dengan pendapatnya, pada saat proses wawancara metode yang digunakan sesuai dengan panduan atau pedoman wawancara yang telah disediakan oleh penulis, dan yang di wawancarai pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.4 yaitu data informan.

²⁶Mardalis, Op. Cit Hal. 64

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto, merupakan mencari data yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti pada hal ini yang serupa dengan tabel 1.5. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang lebih akurat dan menjadi dokumen pendukung dalam karya ilmiah.

d. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari observasi di lapangan, wawancara dengan informan, mengedit hasil observasi dan wawancara, mengklasifikasi, mereduksi data yang diperoleh pada saat di lapangan, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.

e. Metode Analisis data

1. Tahap reduksi data

Langkah reduksi data ada beberapa tahap antara lain :

- a. Mengorganisasikan data-data yang diperoleh, mengelompokkan hasil-hasil wawancara berdasarkan dengan tahap penelitian yaitu dengan kelompok pra bencana, kesiapsiagaan, dan pasca bencana serta meringkas data yang di peroleh dari informan atau pada saat wawancara.

b. Peneliti menyusun catatan-catatan berbagai hal termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan kelompok-kelompok dan pola-pola data. Cara yang dipakai dalam reduksi data bisa melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian yang singkat. Menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

1. Setelah melakukan wawancara kepada informan, peneliti membuat catatan-catatan kecil (ringkasan) ini berlangsung terus menerus sehingga wawancara selesai dilakukan.
2. Selanjutnya berdasarkan ringkasan yang dibuat tersebut, maka peneliti membuat pilihan-pilihan tentang bagian data mana yang akan dibuang dari pola yang digunakan untuk meringkas sejumlah data-data yang masih tersebar.²⁷

2. Tahap penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data pada hasil penelitian yang berupa dengan tabel, gambar dan peta. Pada penelitian kualitatif

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 233

ini data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian atau catatan-catatan kecil yang berhubungan dengan teori penelitian.²⁸

3. Tahap Verifikasi data

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada di lapangan dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Lampung Barat. Tetapi seiring dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*, dimana proses ini menghasilkan teori umum yang diperoleh dari sebuah proses perbandingan pandangan atau pendapat informan dengan data-data yang diperoleh serta data yang saling keterhubungan. Dalam melakukan verifikasi data pada penelitian ini dapat digunakan teori Triangulasi Data,

²⁸Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998) .h. 7

dimana teori ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari setiap informan yang diantaranya anggota TNBBS, tokoh masyarakat, dan mitra TNBBS atau data yang diperoleh pada saat lapangan, pengumpulan dokumen dan data di lapangan dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh.



BAB II

PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH PEMERINTAH

A. Sistem Pemerintahan

1. Definisi Pemerintah

Menurut sarundajang sistem pemerintahan ialah sebutan dari bentuk pemerintahan. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara merupakan peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis itu disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Untuk itu, bentuk pemerintahan lebih populer disebut sebagai sistem pemerintahan.²⁹

Cara memahami sistem pemerintahannya, sistem pemerintahan dapat diartikan dalam sudut pandang sempit dan luas. Secara sudut pandang sempit sistem pemerintahan dapat diartikan sistem penyelenggaraan pemerintahan hanya dilakukan oleh legislatif, sedangkan dalam arti luas sistem pemerintahan yaitu penyelenggara yang dilaksanakan tidak hanya eksekutif melainkan juga melibatkan legislatif dan yudikatif.³⁰

Menurut Inu kencana syafie, pemerintah merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif),

²⁹ Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012), h. 33

³⁰ Muliadi Anangkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintah Modern Kekinian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2 h. 149

pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik dari pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.³¹ Secara sederhana pemerintah dapat kita artikan sebagai tata cara penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan negara oleh lembaga negara kepada rakyat dan rakyat kepada lembaga negara.

2. Tugas, Pokok, dan Fungsi pemerintah.

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi seperti yang dijelaskan beberapa tokoh dibawah ini.

Menurut Adam Smith, pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
- b. Menyelenggarakan peradilan.
- c. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu :

³¹Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara (Jakarta : 2014) Hal. 8

- a. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (public needs).
 - b. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
 - c. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian).³²
3. Sistem Pemerintahan yang baik Berdasarkan Islam (*Good Governance*)

Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan mendasar pada tahun 1999 yaitu dengan diberlakukannya sistem desentralisasi. Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Salah satu tujuan *Good Governance* ialah mendekatkan pemerintah dengan rakyat.

³² <https://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/> diakses pada 22 mei 2020. pukul 07.00

Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki *output* dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.³³

Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sumber hukum materil atas penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyediaan Administrasi Pemerintahan yang cepat dan nyaman. Jaminan kepastian penyediaan Administrasi Pemerintahan harus diatur di dalam hukum Undang-Undang. Hal ini dapat terdiri dari Undang-Undang pokok yang mengatur ketentuan umum tentang Administrasi Pemerintahan dan undang-undang lain yang mengatur secara detail hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-undang ini tidak mengatur hal-hal teknis tujuan dalam penyediaan Administrasi Pemerintahan, tetapi memuat aturan-aturan umum antara lain berkenaan dengan prosedur, bantuan hukum, batas waktu, dan kontrak administrasi dalam Administrasi Pemerintahan. Undang- Undang Administrasi Pemerintahan berisi kaidah-kaidah hubungan antara instansi pemerintah sebagai

³³ Thaha, Rasyid. *Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 1. No. 3. Juni 2017.

penyelenggara administrasi publik dan individu atau masyarakat penerima layanan publik.³⁴

Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dijelaskan pada Bab V tentang kewenangan pemerintah bagian ketiga pasal 10 tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik ialah :

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁵

Dalam *fiqih siyasah* (ketatanegaraan menurut Islam), asas-asas umum pemerintahan yang baik itu, selain diperoleh dari hasil penelitian, putusan hakim dan lain-lain, dapat digali pula dari sumber utama *fiqih siyasah*, yakni Al-Quran dan Hadits. Sebagai contoh dapat disebutkan, antara lain asas amanah, asas tanggung jawab (*al-masuliyyah*), asas maslahat (*al-mashlahah*), dan asas pengawasan (*al-muhasabah*). pengawasan(*al-muhasabah*) terdiri dari pengawasan

³⁴Muhamad Azhar, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, Jurnal Notarius, Edisi ke-8 No. 2 (2015)

³⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

transendental (*al-muhasabah al-ilahiyah*), pengawasan oleh pribadi (*al-muhasabah al-syakhsyiyah*), dan pengawasan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan (*al-muhasabah al-qomariyah*), yang disebut terakhir, dalam Indonesia, dikenal adanya pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan internal, dan pengawasan eksternal. Pengawasan merupakan aspek penting bagi pelaksanaan tugas, ucapan dan perilaku para pejabat dan aparatur negara dalam ketaatan terhadap hukum dan menjalankan tugas dengan baik.³⁶

Al-Qur'an menjelaskan pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance*. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan *good governance* pada pemerintahan. Sebenarnya, konsep *good governance* yang ada dalam Al-Qur'an tak hanya dapat diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Qur'an secara garis besar menjelaskan tentang konsep *accountability*, *transparency*, *justice* dan *equity*.

Accountability atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-*hisab* (dihitung) walaupun sebesar biji

³⁶Sukardja, H Ahmad, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 202

dzarrah di akhirat kelak (QS 99:7-8).³⁷ Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, “*Setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya...*” (HR al-Bukhari no. 2751 dan HR Muslim No 4828)³⁸. Dalam kaitannya dengan konsep *good governance*, komitmen seorang pemimpin (dan juga para pemegang amanah di pemerintahan) akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju *good governance*.

Komitmen sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya menjadi seorang *leader*. Seorang pemimpinlah yang akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik (*good governance*). Tanpa adanya komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari seorang pemimpin, rasanya *good governance* yang diimpi-impikan hanya akan menjadi utopis semata.

³⁷ Terjemahan Al-Qur'an Surah Az-Zalzalah ayat 7-8

³⁸ Terjemahan Al-Hadits Shahih Bukhari No. 2751 dan Muslim No. 4828

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Daffmedia.haditsshahihbukharimuslim>.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Konsep transparansi (*transparency*) dalam ajaran agama Islam yang berkaitan dalam ranah pemerintahan adalah dengan keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah pada masyarakat. Dengan adanya transparansi kinerja pemerintah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang telah dicanangkan. Transparansi dan keterbukaan pemerintah menjadi komponen penting untuk menuju kemajuan suatu negara. Adanya transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah, akan dapat meminimalisir tingkat patologi pada pemerintahan.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hal setiap individu adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, kesamaan derajatnya, kesamaan hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama. Pentingnya keadilan dalam

penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang mutlak diperlukan meskipun keadilan pada umumnya relatif sulit untuk dilakukan. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial, yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang, sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan masyarakat yang adil, istilah keadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, telah mengajar konsep keadilan. Dalam ajaran Islam keadilan dapat diartikan secara sempit sebagai menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Hal ini juga mengisyaratkan untuk memperlakukan orang lain dengan perilaku yang tidak membedakan. Keadilan dalam konsep pemerintahan yang diajarkan oleh agama Islam menjelaskan bahwa pemerintah harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hak masyarakat. Menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, makanan, kebutuhan sandang, dan papan bagi setiap masyarakat. Di dalam Al-Qur'an, salah satu ayat yang menjelaskan konsep terkait keadilan terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, "*Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan*

adil. dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Tafsir ayat QS. Al- Ma'idah ayat 8 pada kitab tafsir ibnu katsir dapat dipahami bahwa ayat di atas termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab alquran, karena di dalam ayat ini digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala perbuatan zalim, dan sifat arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah SWT tidak berbuat zalim kepada siapa pun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dengan menginjak hak orang lain.³⁹ Selain ayat yang tadi dijelaskan, masih cukup banyak ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berperilaku adil.

Konsep ajaran *good governance* dalam ajaran agama Islam diamalkan dan diinternalisasi dalam tata pemerintahan sebaik mungkin, niscaya tidak akan ada patologi sosial seperti korupsi, ketidakadilan sosial, kesenjangan, diskriminasi antar golongan, dan lain-lain. Islam sebagai agama yang sempurna tidak membatasi

³⁹ Tafsir Ibnu Katsir <https://play.google.tafsirlengkapibnukatsir>. sumber kampussunnah.org

pemeluknya untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, bahkan mendorong pemeluknya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Alaq ayat satu sampai dengan lima yang pertama kali diturunkan ke bumi, yang berbunyi, *“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu paling mulia. Yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (manusia tersebut)”*.⁴⁰

Beberapa prinsip dari sistem pemerintahan yang baik menurut islam diantara adalah:

a. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanat yang diembankan di pundaknya (QS. An-Nisa 4:58).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya dengan adil. Sungguh Allah

⁴⁰ <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/> diakses pada 09 agustus 2020 pukul 14.21 WIB

*sebaik baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*⁴¹

Tafsir Ibnu Katsir Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat itu tersampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Didalam hadits Al-Hasan dari samurah disebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”. Hadits riwayat Imam Ahmad dan semua pemilik kitab sunan, maka hadits ini mencakup semua dalam artian bahwa hadits ini umum seperti shalat, zakat, puasa, kifar, dan lain sebagainya.⁴²

Amanah merupakan sesuatu yang harus diperliha karena kelak akan di pertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintahnya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

b. Prinsip Penegakan Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum.⁴³ Allah SWT mengutus para

⁴¹ Terjemahan *Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58*

⁴² Tafsir Ibnu Katsir <https://play.google.tafsirlengkapibnukatsir>. sumber kampusunnah.org

⁴³ Ibid. h. 207

Rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia berlaku adil. Dengan keadilan, bumi dan langit menjadi makmur. Apabila tampak tanda-tanda keadilan dan tampak keadilan itu dengan cara apa pun, maka itulah syariat Allah SWT dan agama-Nya.⁴⁴ Prinsip ini ditemukan dalam Al Quran Surat An-Nahl (4) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظُمُ لَعْنُكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Tafisr Ibnu katsir terhadap surat An-Nahl ayat 90 Allah Swt. menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Ali ibnu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil. (An-Nahl: 90) yakni mengucapkan persaksian bahwa

⁴⁴Farid Abdul Khalid, Fikih Politik Islam (Jakarta: Amzah, 2005), h. 204

tidak ada Tuhan selain Allah dan berlaku adil berdasarkan lahir dan batin.⁴⁵

c. Prinsip Musyawarah

Musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas penguasa juga rakyat. Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan perundang-undangan, juga dalam setiap hal yang menyangkut kemaslahatan individual dan kemaslahatan umat.⁴⁶

Prinsip ini ditemukan dalam Al-Quran Surat Ali-‘Imran (3) ayat 159 yang artinya :

*“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain) kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.*⁴⁷

⁴⁵ Tafsir Ibnu Katsir Qs. An-Nahl ayat 90 <https://play.google.tafsirlengkapibnukatsir.sumber.kampussunnah.org>

⁴⁷ Terjemahan Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 159 tentang musyawarah

Tafsir Ibnu Katsir tentang Qs. Ali-Imran ayat 159 adalah Allah Swt berfirman kepada rasul-Nya seraya menyebutkan anugerah yang telah dilimpahkan-Nya kepada dia, juga kepada orang-orang mukmin; yaitu Allah telah membuat hatinya lemah lembut kepada umatnya yang akibatnya mereka mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, Allah juga membuat tutur katanya terasa menyejukkan hati mereka. Sikap mu kepada mereka yang lemah lembut, tiada hal lain untuk dijadikan oleh Allah buatmu sebagai rahmat bagi dirimu dan juga mereka.⁴⁸

Berdasarkan ayat dan tafsir diatas bahwa musyawarah memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman dan lemah lembutlah dalam bermusyawarah. Bahkan syarat pentingnya musyawarah ini diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang memang seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam demokrasi Islam yang posisinya hanya setingkat di bawah kewajiban shalat.

d. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga, setelah kewajiban mematuhi Allah dan

⁴⁸ Tafsir Ibnu Katsir Qs. Ali-Imran ayat 159 <https://play.google.tafsirlengkapibnukatsir.sumber.kampussunnah.org>

Rasul-Nya. Namun demikian kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁴⁹ Pada surat an-Nisa, 4:59 Allah menerangkan kata “*athi’u*” hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak kepada pemimpin (*ulil al-amr*). Al-Qur’an Surat an-nisa, 4: 59 yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.⁵⁰

Tafsir Ibnu Katsir tentang Qs. An-Nisa ayat 59 yakni Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibnul Fadl, telah menceritakan kepada Hajaj ibnu Muhammad Al-A’War dari ibnu Juraij, dari Ya’la ibnu muslin, dari said ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya. Ibnu Abbas menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Huzafah ketika ia diutus oleh Rasulullah Saw. untuk memimpin suatu pasukan khusus. Dan pada ayat ini juga

⁴⁹ Kewajiban Menaati Pemimpin dalam Kebajikan (on-line), tersedia di <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam> (16 Maret 2020)

⁵⁰ Terjemahan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59 tentang wanita

dipertegasakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri.⁵¹

Good governance seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwasanya untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pemerintah tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, namun juga harus dengan keyakinan dan juga bekal yang cukup agar tidak goyah dalam roda organisasi pemerintahan. Seorang Filsuf yunani yang memberikan teori politiknya dengan menunjukkan bahwa keadilan yang sebenarnya hanya dapat terwujud dalam konteks negara Republik. Dari hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi seseorang yang baik atau pemerintah yang baik harus menunjukkan jiwa keadilan dalam perhimpunan (pemerintahan).⁵²

Konsepsi ini akan menjadi tolak ukur dalam penilaian sistem pemerintahan yang baik dari TNBBS itu sendiri, tolak ukur ini tidak hanya melalui sistem pemerintahan yang baik secara umum, namun akan ditinjau berdasarkan ajaran agama islam atau yang sering dikenal dengan sistem pemerintahan yang baik berdasarkan islam. Pada dasarnya konsepsi *good governance* memiliki bertugas dan bertanggung jawab dalam menerapkan hukum-hukum syariat islam dalam pemerintahan, hal ini juga yang harus diperhatikan pada sistem pemerintahan TNBBS. Dari konsepsi dan prinsip-prinsip

⁵¹ Tafsir Ibnu Katsir Qs. An-Nisa ayat 59 <https://play.google.tafsirlengkapibnukatsir.sumber.kampussunnah.org>

⁵² Khalid, Ibrahim Jidan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). h. 41-42

pemerintahan yang baik berdasarkan islam ini akan dipergunakan dalam meninjau roda organisasi pada instansi TNBBS.

B. Dasar-dasar Kehutanan

1. Definisi Adminitrasi Kehutanan

Administrasi kehutanan adalah suatu pengaturan yang berkaitan dengan hal-hal hutan, kehutanan, sistem pengurusan yang berhubungan dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan flora dan fauna yang diselenggarakan secara terpadu.⁵³ Pada administrasi kehutanan terdapat ruang lingkup tugas adminitrasi kehutanan yaitu :

- a. Menyelenggarakan tugas bidang perlindungan dan konservasi alam;
- b. Menyelenggarakan tugas bidang rehabilitasi lahan dan menyelenggarakan tugas bidang pengelolaan hutan;
- c. Menyelenggarakan tugas bidang planologi kehutanan;
- d. Menyelenggarakan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Menyelenggarakan tugas pengawasan;
- f. Menyelenggarakan tugas pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada unit-unit organisasi lainnya;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tertentu.;
- h. Menyelenggrakan penyuluhan; dan

⁵³ <https://karmidi.blogspot.com/2009/04adminitrasi-kehutanan.html> diakses pada 01 juni 2020 pukul 22.00 WIB

- i. Melaksanakan tugas bidang penyelenggaraan standarisasi dan pengendalian lingkungan.

Pelaksanaan administrasi atau pengurusan hutan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat yaitu pengurusan hutan yang bersifat makro atau nasional.
- b. Pemerintah daerah Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten atau Kota yaitu pengurusan hutan yang bersifat operasional.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menjelaskan pada Bab II bagian Kesatu tentang struktur dan tipologi organisasi yaitu :

Pasal 7 menjelaskan Balai Besar Taman Nasional Tipe A sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
- c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
- d. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
- e. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 9 yang menjalankan roda administrasi adalah bagian Tata Usaha, dimana Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan rencana program dan anggaran serta kerja sama dan kemitraan,

pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan.⁵⁴

2. Dasar Hukum

Hutan kawasan yang ada di TNBBS harus dijaga dan dilestarikan, melalui peraturan dan perundang-undangan atau yang sering disebut dengan landasan hukum, landasan hukum tersebut diantaranya :

1. Undang-Undang

- a. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya.
- b. UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo. UU no. 19 tahun 2004
- c. UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

2. Peraturan Menteri

- a. Peraturan menteri kehutanan no. P.56/MenHut-II/2014 Tentang Masyarakat Mitra Polhut
- b. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 75/MenHut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Taman Nasional Jo. P.47/MENLHK/SETJEN/OTL.0/5/2016.

⁵⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

3. Jenis-Jenis dan Fungsi Hutan

a. Jenis – Jenis Hutan

Berdasarkan UU no. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan hutan berdasarkan status nya terdiri dari :

3. Hutan Negara dan
4. Hutan Hak

Hutan negara yang dimaksud dapat berupa hutan adat, pemerintah menetapkan status hutan adat berdasarkan dengan kenyataannya sepanjang masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.⁵⁵

Secara umum hutan di Indonesia memiliki beberapa jenis diantaranya adalah :

1. Hutan Bakau

Hutan bakau biasanya tumbuh di pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkena pasang surut, hutan bakau ini sangatlah penting, karena menjadi tempat berkembang biaknya fauna berjenis ikan dan udang. Hutan bakau ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya :

⁵⁵ Undang – undang no.41 tahun 1999 tentang kehutanan

- a. Hutan bakau sebagai pemecah dan penahan ombak
- b. Hutan bakau sebagai pemecah abrasi terhadap air laut
- c. Hutan bakau menjadi tempat tinggal spesies jenis ikan laut.⁵⁶

2. Hutan Rawa

Hutan rawa terdapat di daerah dengan berbagai jenis tumbuhan seperti ketapang, beluntas dan pandan. Jenis hutan ini banyak terdapat di pantai timur Sumatra, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Hutan rawa memiliki ciri-ciri yaitu :

- a. Tanahnya selalu digenangi oleh air. Air yang banyak ini bahkan bisa membentuk kolam maupun rawa.
- b. Seperti namanya. Hutan rawa gambut juga memiliki lapisan tanah berupa tanah gambut.
- c. Tanaman yang dapat hidup di hutan rawa gambut rata-rata berukuran kecil dan akarnya tidak sekuat tanaman yang berada di tanah yang padat.
- d. Sedangkan untuk tanaman yang tumbuh di tanah padat disekitarnya. Contoh saja kayu ranim, tanaman ini bisa tumbuh dengan subur sampai tingginya mencapai 40 meter.

⁵⁶ <https://www.wajibbaca.com/2019/05/jenis-jenis-hutan.html> (20 mei 2020)

3. Hutan Sabana

Sabana merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Nusa Tenggara. Ciri-ciri hutan sabana yaitu :

- a. Hutan terdiri dari tumbuhan ilalang serta semak-semak yang banyak.
- b. Curah hujan yang terdapat pada hutan sabana tidak sama banyak seperti curah hujan pada hutan tropis.
- c. Suhu daratan di hutan ini cukup tinggi, sehingga menyebabkan kelembaban hutan ini menjadi rendah.

4. Hutan Musim

Hutan musim diberi julukan hutan musim karena memiliki perbedaan pada musim hujan dan musim kemarau yang cukup menonjol. Tumbuhan yang ada pada hutan musim kemarau ini adalah akan meranggas, dan pada musim hujan akan tumbuh lebat kembali.

5. Hutan Hujan Tropis

Hutan hujan tropis merupakan jenis hutan yang sangat terkenal di Indonesia, Indonesia yang memiliki iklim tropis lebih banyak mendapatkan sinar matahari, memiliki curah hujan yang

tinggi serta temperatur yang rata-rata tinggi. Ciri-ciri hutan hujan tropis adalah :

- a. Tanaman yang ada pada hutan hujan tropis ini memiliki jenis batang yang besar, tinggi, daun yang lebat dan tanaman satu dengan yang lainnya saling berdekatan ;
- b. Terdapat berbagai jenis flora dan fauna ;dan,
- c. Salah satu ciri terakhir dari hutan hujan tropis adalah curah hujan yang cukup tinggi, karena wilayahnya yang berada pada 10 LU – 10 LS.

b. Hutan mempunyai fungsinya hutan yang terdiri dari :

1. Fungsi ekosistem
2. Fungsi konservasi

4. Kebijakan dalam pengelolaan hutan

Pengelolaan hutan adalah cabang dari kehutanan yang berhubungan dengan administrasi, ekonomi, hukum, dan sosial secara keseluruhan dan dengan ilmiah dengan teknis aspek dasarnya, terutama silvikultur, perlindungan, dan regulasi hutan, ini termasuk manajemen untuk estetika, ikan, rekreasi, nilai-nilai perkotaan, air, padang gurun, satwa liar, produk kayu, genetik sumber daya hutan, dan sumber daya hutan. Sistem dapat didasarkan pada konservasi, ekonomi atau campuran keduanya. Teknik termasuk kayu ekstraksi, penanaman dan

penanaman kembali berbagai jenis, memotong jalan dan jalur kesadaran publik kebijakan sumber daya alam, termasuk pengelolaan hutan.⁵⁷

C. Konsep Bencana Alam

1. Definisi Bencana

Bencana merupakan suatu gangguan ekstrim fungsi dari masyarakat yang menyebabkan kerugian sosial, politik, material yang meluas di kehidupan sosial masyarakat.⁵⁸ Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (lampiran 1) bahwa yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁵⁹

2. Jenis-jenis dan Faktor Penyebab Bencana

Secara umum bencana dapat dikelompokkan menjadi dua jenis ialah :

- a. Bencana yang sedikit banyak disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti banjir, longsor, abrasi dan kebakaran hutan.

⁵⁷ Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia* (Jakarta, Rineka Cipta. 2011) hal. 117

⁵⁸ Ulum, M. Chazienul. *Manajemen Bencana*. (Malang: UB Press, 2014) hal. 17

⁵⁹ Undang-undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

- b. Selanjutnya yaitu bencana alam yang disebabkan secara murni oleh alam misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan puting beliung.⁶⁰

Bencana alam dapat memberikan dampak yang serius dan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini tergantung pada intensitas bencana, letak geografis permukiman yang terkena dampak, saat terjadi bencana dan sebagainya. Dampak bencana bagi kehidupan sosial masyarakat seperti dampak psikologis, ekonomi, sosial, politik, dan dampak ekologis dikalangan masyarakat sehingga masyarakat harus tetap memperhatikan langkah-langkah penanggulangan bencana baik yang diberikan oleh pemerintah setempat ataupun mencari informasi untuk pengulangan secara mandiri.

3. Manajemen Bencana

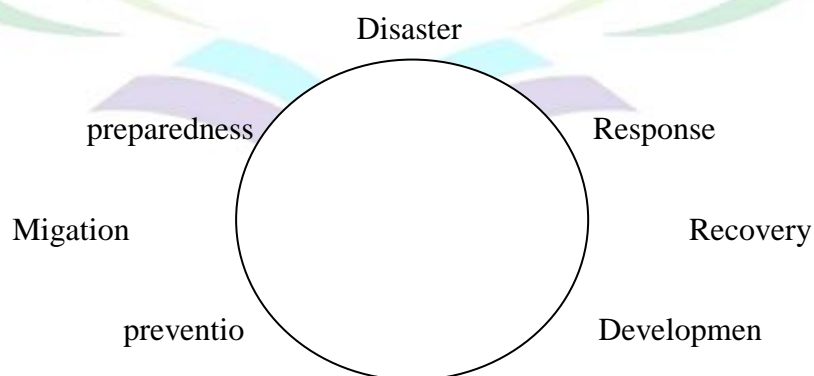
Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2007, manajemen bencana merupakan suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang bersangkutan dengan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana.⁶¹

⁶⁰Ulum. M, *Ibid.* Hal. 18

⁶¹ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Manajemen bencana juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan dan pengelolaan sumber daya lingkungan sampai pada alam untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat, terutama diarea rawan bencana. Menangani penyebab dari bencana akan berperan pada perbaikan kualitas hidup manusia dan lingkungan secara keseluruhan.⁶²

Peraturan pemerintah No. 21 tahun 2008 pada bab 1 pasal 3 menyatakan bahwa “penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.” Jadi, Teori yang disampaikan oleh oleh Nick W. Carter sama hal nya seperti yang disampaikan pada PP No. 21 tahun 2008 bahwa saat manajemen bencana terdapat tiga kegiatan inti yang diantaranya melalui beberapa tahap seperti yang ada pada gambar 1 yaitu *Disaster Management Cycle*⁶³ :



Gambar 1 *Disaster Management Cycle*

Sumber: *Disaster Management, A manager's Handbook Asian Development Bank*

⁶² Ulum. M, *Ibid.*, Hal. 22

⁶³ W. Nick, Carter. *Disaster Management*, (Philippines, Asian Development Bank, 2008). hal. 20.

Berdasarkan gambar 1 yang ada diatas, maka siklus manajemen bencana dapat diuraikan dan dapat dikelompokkan, seperti yang tersampaikan pada uraian berikut berdasarkan dengan kegiatan inti diantaranya :

- a. kegiatan pra bencana, pada aspek pra bencana terdapat 3 aktifitas penting yang harus diperhatikan yaitu:

1. Preventif (pencegahan)

Preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana.

2. Migitasi bencana

Migitasi bencana adalah suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya bencana dengan mengurangi resiko bencana seperti pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelaksanaan penataan ruang, penyelenggaraan pendidikan pelatihan baik secara konvensional maupun secara modern.

3. *Preparedness*/ kesiapsiagaan

Preparedness merupakan suatu tindakan cepat yang harus dilakukan untuk merespon terjadinya bencana.⁶⁴ Ada

⁶⁴ Kunto Arief Wibowo, *Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan* , Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 3 No. 1 (2019)

Beberapa prinsip dasar kesiapsiagaan yang dikemukakan oleh Drabek & Hoetmar yakni :

a) Definisi kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan proses yang berkesinambungan pengembangan rencana secara tertulis dalam waktu tertentu, yang artinya bahwa setiap rencana dalam penanganan harus selalu di *up to date* agar dapat melihat situasi dan kondisi serta mengantisipasi adanya kondisi dan kebutuhan yang muncul dalam perkembangan.

b) Kesiapsiagaan mengurangi ketidaktauhan selama bencana

Tujuan dari kesiapsiagaan adalah mengantisipasi masalah dan membuat sebuah solusi memungkinkan untuk meminimalisir sebuah masalah, oleh karena itu sangat sulit untuk memprediksi waktu dan tempat akan terjadinya suatu bencana, tetapi kesiapsiagaan ini mencoba untuk mengecilkan dampak bencana terhadap lingkungan, baik secara fisik maupun secara sosial.

c) Kesiapsiagaan merupakan kegiatan pendidikan

Kesiapsiagaan harus dilatih dan disosialisasikan kepada individu, kelompok, maupun lapisan

masyarakat agar mengetahui bagaimana langkah-langkah ketika terjadi bencana.

d) kesiapsiagaan menimbulkan tindakan yang tepat

Perencanaan dapat dilihat dari salah satu cara untuk meningkatkan suatu kecepatan respon ketika bencana terjadi, meskipun kecepatan merupakan aspek yang penting, bereaksi lebih cepat itu lebih penting.⁶⁵

b. Masa tanggap darurat

1. *Disaster*

Disaster atau bencana dimana proses ini merupakan tindakan ketika terjadinya bencana di suatu tempat.

2. *Response* (tanggap darurat)

Tanggap darurat merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, kegiatan tanggap darurat meliputi kegiatan penyelamatan, evaluasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Beberapa aktifitas yang dilakukan pada masa tanggap darurat yaitu :

a. Pengkajian yang tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya;

⁶⁵ Bevaola, Kusumasari. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014) h. 26

- b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Penyelamatan dan evakuasi jika ada korban yang terdampak bencana;
- d. Perlindungan dengan kelompok rentan; dan
- e. Pemulihan dengan segera sarana dan pra sarana vital.⁶⁶

Respon merupakan tahapan yang paling kompleks dari kelima tahapan manajemen bencana, karena respon dilakukan dengan periode stres yang sangat tinggi, lingkungan yang sangat terbatas, waktu dan informasi pula yang terbatas. Respon tidak meliputi kegiatan pembatasan hal-hal cidera, hilangnya nyawa, serta kerusakan harta benda. Tetapi juga mencakup sistem yang dikembangkan untuk mengoordinasikan dan mendukung upaya-upaya tersebut.

c. Kegiatan pasca bencana

1. *Recovery* / pemulihan

Pemulihan adalah kegiatan mengembalikan infrastruktur kepada standar operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi normal atau keadaan yang lebih baik setelah terjadi bencana. Kegiatan pemulihan meliputi

⁶⁶ <https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengertian-jenis-dan-manajemen-bencana.html?m=1> diakses pada 16 juli 2020 pukul 03.15 WIB

keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana, maksudnya adalah untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi kehidupan pra bencana dari masyarakat yang terkena dampak bencana. Proses Pemulihan membutuhkan waktu yang cukup lama dengan perencanaan, pendataan, koordinasi dan pendanaan yang kompleks. Pemulihan ini juga dibagi menjadi dua kegiatan yaitu pemulihan jangka pendek dan pemulihan jangka panjang. Jangka pendek dilakukan segera setelah terjadi peristiwa bencana atau kebakaran hutan dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan mereka yang terkena dampak dari bencana, pemulihan ini juga dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjalani perjalanan panjang menuju pembangunan kembali setelah bencana. Pemulihan jangka panjang tidak dimulai sampai fase darurat bencana berakhir, yaitu disaat masyarakat atau pihak Taman Nasional mulai merehabilitasi dan membangun kembali atau melakukan penghijauan kembali di area kebakaran.⁶⁷

4. Indikator Penentu Keberhasilan Manajemen Bencana

Banyak ahli kebencanaan yang menentukan apa saja yang menjadi faktor-faktor penentu keberhasilan dari manajemen bencana, faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel 6.

⁶⁷ Bevaola, *Ibid.* H. 31

Tabel 6

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Manajemen Bencana

Indikator	Penjelasan
Pengaturan kelembagaan yang efektif (Moe & Pathranarakul, 2006)	Pengaturan kelembagaan adalah faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen bencana, terutama pada kondisi ketika pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki otoritas atau dapat menyebabkan ketidakjelasan distribusi kekuasaan otoritas dan penundaan pembuatan keputusan, terutama dalam hal bantuan darurat dan rehabilitasi, harus ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.
Koordinasi dan kolaborasi (Charoenngam & Leungbootnark, 2005)	Ada lima level berbeda dari koordinasi dan kolaborasi diantara pemangku kepentingan utama: tingkat internasional, nasional, regional, organisasi, dan proyek. Namun kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan hal umum yang ditemukan di banyak negara.
Undang-undang dan Peraturan yang mendukung (Tingsanchali, 2005)	Undang-undang dan peraturan yang mendukung berdampak positif pada keberhasilan kebijakan manajemen bencana. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan tersebut harus ditetapkan dan diberlakukan untuk menciptakan lingkungan atau alam yang kondusif dalam manajemen bencana. ⁶⁸

Sumber : diadaptasi dari Charoenngam dan Leungbootnark, 2005; Diallo & Thuiller, 2004; Moe & Pathranarakul, 2006; Newport & Jawahar, 2003; Perry, 2007; Turner & Muller, 2004

⁶⁸ Bevaola, *Ibid* h. 33

D. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

1. Pentingnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat memberikan dampak pada sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai masyarakat sosial agar tetap terjaga suatu lingkungan maka masyarakat harus menjaga, memperhatikan dan mempelajari suatu langkah langkah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Seperti yang kita ketahui bahwa, hutan merupakan suatu ekosistem yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik dari kalangan bawah sampai pada tingkat masyarakat kelas atas. Tidak bisa di pungkiri bahwa hutan menjadi tempat tinggal flora dan fauna baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, penting bagi kita sebagai masyarakat harus menanamkan rasa peduli terhadap lingkungan dan menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Sebagian besar masyarakat sadar dan mengerti dampak langsung kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu kesehatan, dampak keamanan, dampak polusi, berdampak pada flora dan fauna yang ada di hutan, yang mengakibatkan banyak flora dan fauna meninggal di lokasi kebakaran dan berdampak pada kerugian ekonomi masyarakat karena kerugian material.

2. Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Manajemen hutan dan lahan di Sumatera serta pola penggunaan dapat berubah secara cepat lebih dari tiga dekade yang lalu, pemerintah daerah dan masyarakat di Sumatera memiliki peranan dan tanggung jawab dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada di kawasan TNBBS. Berdasarkan PP no. 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan maka terdapat masing-masing peran untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.⁶⁹

Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang terdapat pada pasal 11 dan setiap orang diwajibkan untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terdapat. Untuk penanggung jawab usaha, baginya yang memiliki usaha yang memiliki faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan pencegahan kebakaran dan pencemaran kerusakan lingkungan dengan melengkapi sarana dan prasarana seperti yang tertuang pada pasal 14 ayat 1, sarana dan prasarana yang dimaksud ialah pasal 14 ayat 2.

Tingkat pusat, menteri kehutanan bertanggung jawab dalam menjalankan koordinasi pada pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang berada pada lintas provinsi dan perbatasan negara hal ini ada pada pasal 23. Dalam melaksanakan tanggung jawab koordinasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan lintas provinsi dan

⁶⁹ Hero Saharjo, Bambang, et. al, *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Komunitas Terdampak Asap*, (Bogor, IPB Press, 2018) hal. 78

atau lintas batas negara maka Menteri Kehutanan mengkoordinasikan:

- a. Penyediaan sarana pemadam kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Pengembangan sumberdaya manusia untuk pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Pelaksanaan kerja sama internasional untuk pemadamaan kebakaran hutan dan atau lahan (pasal 24). Bila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab Departemen Kehutanan (tingkat pusat) adalah kawasan konservasi, sementara hutan lindung dan hutan produksi adalah tanggung jawab Dinas Kehutanan. Sementara itu dalam rangka pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan maka instansi yang bertanggung lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup) mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dibidang evaluasi dampak lingkungan hidup dan penyusunan strategi pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (pasal 25) serta bertanggung jawab mengkoordinasikan penanggulangan dampak dan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi pada lintas batas provinsi dan atau lintas batas negara (pasal 26).⁷⁰

Peraturan dan kebijakan pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan memiliki beberapa peraturan undang-undangan yang masih terpakai hingga saat ini yaitu :

1. Undang-undang Nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan, merupakan penjabaran dari UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.

3. Strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Strategi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan cara pengelompokan klasifikasi bahan bakar

⁷⁰ Hero saharjo, Bambang, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia*, (Bogor,IPB Press, 2016), hal. 48

yang memicu potensi dan peluang terjadinya kebakaran bagi manajer hutan yang dilindungi. Apa yang diperlukan dan kemudian ialah suatu sistem yang menghubungkan antara aspek vegetasi atau ekologi dari suatu tutupan dengan perilaku api yang ditentukan oleh bahan bakar dan cuaca.⁷¹

E. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mengelola hutan.

TNBBS merupakan unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jalur koordinasi antara BBTNBBS dengan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa dalam menangani kebakaran hutan yang ada di Lampung Barat adalah tidak keluar dari jalur atau koridor yang ada dan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 7 tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional, serta jalur koordinasi antara bidang ataupun pihak instansi Balai Besar dengan aparatur non pemerintah dengan cara mengaktifkan posko siaga pengendalian kebakaran hutan, posko ini berada di tingkat pusat BBTNBBS sampai pada tingkat seksi pengelolaan taman nasional dan koordinasi dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pada susunan satuan tugas pengendalian kebakaran hutan.

⁷¹ Hero saharjo, Bambang, *Ibid.*, hal. 64

TNBBS membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai satgas yang bertanggung jawab langsung pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Taman Nasional, serta TNBBS melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pada mitra TNBBS dan masyarakat sekitar yang berdekatan dengan hutan kawasan.

